

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan peran yang sesuai, perlu adanya pemberdayaan perempuan agar diskriminasi dapat diatasi. Sebagaimana halnya ras dan partisipasinya dalam masyarakat, pemberdayaan perempuan merupakan proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan (Ma'arif & Syafi'i, 2003)

Kestidaksetaraan gender merupakan pelanggaran terhadap martabat perempuan, perempuan adalah manusia sama dengan laki-laki, mereka dijamin mempunyai hak yang sama dengan laki-laki berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan konvensi internasional lainnya. Perempuan tidak diberi hak-haknya dan seringkali diperlakukan tidak sesuai sebagai manusia seutuhnya. Diskriminasi gender, subordinasi dan eksploitasi perempuan merupakan pelanggaran terhadap norma kesetaraan manusia dan hak universal perempuan (Abbott & Malunda, 2016).

Rwanda merupakan negara yang memiliki sejarah kelam genosida pada tahun 1994. Peristiwa ini terjadi karena adanya konflik etnis antara Hutu dan Tutsi. Akibat terjadinya genosida ini, diperkirakan 800.000 orang tewas dalam 100 hari dan menjadikan 70 persen penduduk yang tersisa adalah perempuan. Perempuan adalah

korban yang paling menderita, diperkirakan lebih dari 250.000 perempuan mengalami kekerasan seksual saat peristiwa ini terjadi (Zurianti, 2022).

Budaya patriarki telah melekat pada masyarakat Rwanda bahkan sebelum terjadinya genosida. Isu ketidaksetaraan gender dapat dianggap sebagai manifestasi dari norma patriarki, nilai patriarki menjadikan perempuan di mata masyarakat hanya untuk menjadi ibu rumah tangga, memberikan keturunan, dan menjadi istri yang berbakti terhadap perempuan, hal tersebut menjadi akibat adanya budaya dan konsep maskulinitas dalam diri laki-laki. Kebijakan hukum Rwanda terkait penegakan undang-undang kesetaraan gender, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta stereotip gender dan sikap patriarki yang terus berlanjut menjadi hambatan utama dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sejak tahun 2000 pemerintah Rwanda telah mengeluarkan agenda penting dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, kekerasan berbasis gender masih menjadi kenyataan yang tragis di Rwanda. Satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hukum terhadap perempuan masih sulit untuk ditegakkan. Kekerasan yang terjadi berkisar dari fisik, psikologis, seksual atau ekonomi. Rwanda masih merupakan masyarakat patriarki yang norma-normanya ditentukan secara ketat berdasarkan gender. Meskipun pemerintah Rwanda telah berupaya menghapus tindak kekerasan berbasis gender pasca terjadinya konflik etnis, tetapi kenyataannya kekerasan berbasis gender masih terus terjadi (Caterina & Hamelin, 2018).

Parameter masyarakat patriarki yang menyetujui istilah perbedaan gender dalam hak waris dengan secara diam-diam menyetujui kekerasan domestik dan kekerasan seksual dan menyetujui perbedaan upah untuk pekerjaan yang setara

terhadap posisi perempuan yang tidak setara secara struktural menjadikan laki-laki lebih dominan terhadap perempuan. Laki-laki dilatih untuk berbagai kegiatan kepemimpinan sedangkan perempuan hanya sebatas pada kegiatan rumah tangga. Budaya dan agama telah mendikte hubungan laki-laki dan perempuan selama berabad-abad dan mengakarkan dominasi laki-laki ke dalam struktur dan institusi sosial. Patriarki membenarkan marginalisasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, politik, tenaga kerja, bisnis, pasar, keluarga, urusan rumah tangga dan warisan (Allanana, 2013).

Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang serius karena hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup di masa depan. Karena kekerasan dapat memengaruhi kesehatan mental, fisik, seksual dan juga reproduksi. Kekerasan pada perempuan dapat menimbulkan dampak negatif pada hidup mereka, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Hal ini juga dapat memberikan pengaruh jangka panjang sehingga dapat menimbulkan masalah perkembangan sosial dan pribadi dan dapat mempengaruhi status sosial ekonomi melalui akademik seperti pencapaian pendidikan, partisipasi tenaga kerja, dan status pekerjaan (Tristiana, 2023).

Hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan melemahkan dan menghilangkan kontribusi sosial, ekonomi, dan politik perempuan terhadap pembangunan diri mereka sendiri, keluarga, kelompok, dan bangsa. Warisan genosida tahun 1994 yang menggunakan HIV dan pemerkosaan terhadap perempuan sebagai senjata perang, menjadi masalah kekerasan gender yang terus berlanjut. Upaya masih perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender di Rwanda. Pada tahun 2018, tercatat 23,5% perempuan berusia 15-49 tahun

melaporkan bahwa mereka pernah menjadi sasaran kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya dalam 12 bulan sebelumnya (UN Women, 2020a).

Kesetaraan gender seringkali dipandang sebagai “masalah perempuan”, tetapi pada kenyataannya kesetaraan gender sangat erat kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender sejati merupakan kemitraan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan dan anak perempuan serta anak laki-laki memainkan peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Peran laki-laki dan anak laki-laki telah disorot dalam kampanye HeforShe yang dipimpin oleh UN Women. Rwanda telah menjadi pionir dan teladan atas dedikasi dan kemajuan yang dicapai dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Putri, 2023).

Menurut laporan UN Women, setidaknya 41 persen perempuan mengalami kekerasan fisik, dan sekitar sepertiga perempuan serta anak perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual. Negara telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, namun hukum terhadap perempuan Rwanda sulit ditegakkan terutama di daerah pedesaan. Perempuan Rwanda yang hidup di pedesaan sangat rentan mengalami kekerasan, yang paling umum dilakukan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Per harinya tercatat bahwa sebanyak 12 perempuan mengalami kekerasan dan kebanyakan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat (Cousins, 2018).

Dalam dua dekade sejak genosida 1994, kekerasan berbasis gender masih sering terjadi. Rwanda masih menjadi masyarakat patriarki yang norma-normanya ditentukan dengan ketat berdasarkan gender (Caterina & Hamelin, 2018). Oleh

karena itu, pemerintah berupaya untuk membuat gebrakan pasca genosida. Seruan untuk kesetaraan gender dipelopori oleh seorang laki-laki, Presiden Paul Kagame yang telah memimpin Rwanda pasca genosida. Kagame mengatakan bahwa Rwanda telah hancur dan tidak bisa dibangun kembali hanya dengan tenaga kerja laki-laki (Warner, 2016).

Oleh karena itu, UN Women hadir sebagai jembatan untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender di Rwanda. UN Women memberikan dukungan penuh dalam menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender dan bekerja dengan pemerintah serta masyarakat sipil untuk merancang kebijakan, program, layanan, dan undang-undang untuk diterapkan secara efektif dan bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan Rwanda (UN Women, 2020b).

UN Women telah mendukung pemajuan kesetaraan gender di dalam pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan manifestasinya (Haspels & Suriyasarn, 2005). Sejak tahun 2018, UN Women telah mendukung serangkaian sesi pelatihan tentang kepemimpinan dan berbicara di depan umum untuk perempuan Rwanda. Karena banyaknya jumlah perempuan, urgensi perempuan dalam aktivitas publik menjadi penting bagi pemerintah Rwanda. Melalui komitmen politik yang kuat serta akuntabilitas tingkat nasional, Rwanda memberikan kesan untuk kesetaraan generasi. Dengan berbagai lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki mekanisme efektif dalam pengarusutamaan dan pemantauan *Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)*.

Pemerintah Rwanda telah mengupayakan segala bentuk ketidaksetaraan gender yang terjadi di Rwanda pasca genosida. Namun, kenyataan bahwa Rwanda merupakan negara yang masyarakatnya masih hidup dalam lingkungan patriarki merupakan hambatan tersendiri bagi Rwanda. Jumlah perempuan yang cenderung mendominasi di Rwanda menjadi masalah utama. Perempuan masih bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak yang tidak dibayar. Hal ini semakin membatasi terbatasnya peluang perempuan dan anak perempuan dalam mengakses sumber daya, mendirikan dan mengelola usaha kecil, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (UNDP, 2018).

Rwanda telah mencapai lingkungan yang kondusif dan kemajuan pada tahun 2013, namun pencapaian GEWE masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut merupakan kemiskinan yang terjadi terus menerus dikalangan kepala rumah tangga yang sebagian besar dikepalai oleh perempuan, terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi dan sumber daya bagi banyak perempuan, tingginya tingkat kekerasan berbasis gender, partisipasi perempuan yang tidak merata dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang sebagian besar terjadi pada tingkat desentralisasi, hambatan dalam penegakan hukum (UN Women, 2018).

UN Women Rwanda melalui kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan, memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan Rwanda dalam *Gender Equality and Women's Empowerment* (GEWE). Dukungan UN Women Rwanda dengan intervensi normatif, koordinasi dan program yang bersifat strategis ini menjadikan perempuan Rwanda membuat perubahan besar, dengan budaya masyarakat yang tadinya hidup dalam masyarakat

patriarki, kini perempuan Rwanda keluar dari belenggu tersebut. (UN Women, 2020b)

Karena gagasan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan agenda khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemerintah menaruh perhatian dan bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk mengimplementasikan program-program untuk memberdayakan perempuan bersama dengan *United Nation Women*. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Peran UN Women melalui *Gender Equality and Women's Empowerment* dalam Pemberdayaan Perempuan Rwanda.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana upaya UN Women melalui *Gender Equality and Women's Empowerment* dalam Pemberdayaan Perempuan di Rwanda?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada upaya UN Women melalui *Gender Equality and Women's Empowerment* (GEWE) pada Kebijakan Pemerintah Rwanda dalam mendorong Pemberdayaan Perempuan. Lingkup pembahasan ini dilakukan pada jangka waktu 2018-2023. Karena pada tahun ini Program GEWE dijalankan dan tercatat di tahun 2018 diskriminasi gender masih terjadi di Rwanda. Agar tidak terjadi kerancuan, Peneliti ingin mengetahui

bagaimana peran UN Women melalui Program GEWE dalam mendorong pemberdayaan perempuan Rwanda.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kondisi Perempuan Rwanda
2. Untuk mengetahui Peran UN Women
3. Untuk mengetahui Implementasi UN Women melalui *Gender Equality and Women's Empowerment* (GEWE) dalam pemberdayaan perempuan Rwanda

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi para pengembang studi ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan peneliti serta pembaca mengenai seberapa pentingnya pengaruh kesetaraan gender di Rwanda dalam upayanya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga menjadi perhatian secara global.

3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.